

TESIS

ANALISIS DEFISIT ANGGARAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE STATE BUDGET DEFICIT IN INDONESIA

HADARIA



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS DEFISIT ANGGARAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE STATE BUDGET DEFICIT IN INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

**HADARIA
A032181001**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS DEFISIT ANGGARAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

HADARIA
A032181001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2022 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan,

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Madris, SE., Dps., M.Si., CWM®
NIP 1960 1231 1988 11 1 002

Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM®
NIP 19770119 200801 2 008

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Pembangunan
dan Perencanaan



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM®
NIP 19651012 199903 2 001

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadaria

Nim : A032181001

Program Stud : Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS DEFISIT ANGGARAN BELANJA NEGARA DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/terbitkan sebelumnya, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar 20, Agustus 2022



Hadaria

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya untuk Allah SWT, dzat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang tak henti-hentinya memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh ummat manusia. Berkat izin-Nya pulalah penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Defisit Anggaran Belanja Negara Di Indonesia”. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sang pejuang kemanusiaan, pembela kaum tertindas, yang telah menjadi suri teladan umat menuju gerbang pencerahan, semoga kelak penulis mampu mengikuti jejak perjuangan Beliau. Aamiin.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari fakta yang menunjukkan bahwa Defisit anggaran belanja negara terus meningkat dan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami fluktuasi selama sembilan belas tahun terakhir. Sehingga peneliti tertarik untuk menyumbang konsep untuk menyikapi permasalahan tersebut, dimana nilai tukar, inflasi dan suku bunga (BI-Rate) sebagai variabel dependennya.

Tesis ini merupakan sebuah karya penulis yang masih jauh dari sempurna, sebuah tulisan yang bahkan oleh penulis sendiripun tak akan menyangkal untuk mengakuinya sebagai sebuah karya yang belum layak baca. Akan tetapi sebagai sebuah proses awal, penulis berharap tulisan ini mampu memberikan banyak pelajaran dan mampu menjadi pemantik semangat dalam melahirkan karya-karya selanjutnya. Karya yang mendidik, karya yang jujur, dan tentu saja karya yang telah layak baca. Harapan itu tidak hanya untuk penulis sendiri tapi untuk para pembaca sekalian, baik yang sengaja maupun yang secara tak sengaja membaca Tesis ini Banyak kendala yang penulis hadapi dalam rangka penyusunan tesis ini, dan hanya berkat

bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Dr. Madris, SE.,DPS.,MSi., CWM[®] sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM[®] sebagai Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program S2, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Unhas, Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen yang pernah mengajar penulis pada Program S2 Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin dan kepada seluruh tim penguji, Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA, Dr. Anas Iswanto Anwar., SE.,MA., CWM[®], Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM[®], dan Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane, SE., MA., CWM[®] selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan yang telah meluangkan waktu dalam meneliti keabsahan dan memberikan kritik serta saran yang sangat berguna atas penyempurnaan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

Terima kasih teman-teman EPP dan ESD Unhas yang telah banyak membantu penulis, teman-teman S1 Ilmu Ekonomi yang masih keep in touch yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan moril serta kerja samanya. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman semasa kuliah di Pasca Sarjana Unhas yaitu Sitti Nurmawati dan Nurhidayah yang senantiasa membantu dan menemani

penulis. serta semangat dan doa yang tiada henti serta teman-teman dan para sahabat di Pasca Ekonomi dan Bisnis UNHAS EPP, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terima kasih yang tak terhingga atas keikhlasan kedua orang tua, Ayahanda Karim Ganni dan Ibunda Alm.Hj Olong, membesarkan dan mendoakan penulis. Penulis juga sangat bersyukur dan merasa beruntung karena tidak hanya sebagai orang tua, keduanya juga sangat berperan dalam memberikan petunjuk, doa, saran, motivasi dan telah menitiskan niat dan ruh suci dan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat mencapai cita- cita dan kepada saudara penulis, Hasria yang dengan penuh kesabaran terus membimbing dan memberi saran kepada penulis. Maha Suci Engkau Ya Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hikmah. Wallahu'alam.

Makassar, Agustus 2022



Hadaria

ABSTRAK

HADARIA. *Analisis Defisit Anggaran Belanja Negara di Indonesia* (dibimbing oleh Madris dan Nur Dwiana Sari Saudi).

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap defisit anggaran belanja negara di Indonesia, melalui pertumbuhan ekonomi adapun periode penelitian sejak tahun 2002 sampai 2020. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* dari tahun 2002 hingga 2020. Data dianalisis dengan metode analisis regresi persamaan struktural dengan menggunakan software AMOS. Adapun sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung suku bunga berpengaruh terhadap defisit anggaran dan tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar secara langsung berpengaruh terhadap defisit anggaran dan tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Inflasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap defisit anggaran dan tidak berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap defisit anggaran.

Kata kunci: Defisit Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar.



ABSTRACT

HADARIA. *Analysis of The State Budget Deficit in Indonesia* (Supervised by **Madris and Nur Dwiana Sari Saudi**)

This study aims to examine the effect of inflation, interest rate, and exchange rates to the State Budget Deficit in Indonesia, through Growth Economics for the research period from 2002 to 2020. In this study it was used secondary data in the form of time series from 2002 to 2020. The method in this study was Structural Equation Regression Analysis using AMOS software. The data sources were obtained from the Central Statistics Agency, Ministry of Finance of Republic of Indonesia. The finding of this study directly indicate that interest rates has an effect on the budget deficit and does not affect directly through economic growth. Live Exchange rates has an effect on the budget deficit and does not affect directly through economic growth. Inflation has no significant effect directly to the budget deficit and has no indirect effect directly through economic growth. Economic growth has no direct effect on the budget deficit.

Keywords: Budget Deficit, Economic Growth, Inflation, Interest Rates, and Exchange rate



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

2.1	Landasan Teoritis	10
2.1.1	Defisit Anggaran.....	10
2.1.2	Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.3	Inflasi	29
2.1.4	Suku Bunga	30
2.1.5	Nilai Tukar/Kurs.....	32
2.2	Hubungan Antar Variabel	35
2.2.1	Keterkaitan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit Anggaran.....	35
2.2.2	Keterkaitan Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit Anggaran.....	39
2.2.3	Keterkaitan Nilai tukar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit Anggaran.....	41
2.3	Penelitian Terdahulu	43
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS		49
3.1	Kerangka Pemikiran.....	49
3.2	Hipotesis	51
BAB IV METODE PENELITIAN		53
4.1	Rancangan Penelitian	53
4.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	53
4.3	Jenis dan Sumber	53
4.4	Metode Pengumpulan Data	54
4.5	Metode Penelitian	54
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
5.1	Deskripsi Data.....	58

5.1.1 Defisit Anggaran.....	58
5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	59
5.1.3 Inflasi	61
5.1.4 Suku Bunga	62
5.1.5 Nilai Tukar.....	64
5.1.6 Hasil Penelitian	66
5.2 Pembahasan.....	69
5.2.1 Pengaruh Inflasi terhadap Defisit anggaran.....	69
5.2.2 pengaruh suku bunga terhadap defisit anggaran	71
5.2.3 Pengaruh Nilai Tukar terhadap defisit anggaran.....	72
5.2.4 Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap defisit anggaran.....	73
BAB VI PENUTUP	74
6.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	66
Tabel 5.2	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep Penelitian	51
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Mentah	82
Lampiran 2. Hasil Estimasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Dalam pemerintahan istilah ini dikenal dengan defisit anggaran. Defisit Anggaran adalah kebijakan pemerintah membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara untuk memberi perubahan pada perekonomian. Defisit Anggaran bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan (Sriyana, 2012).

Instrumen kebijakan fiskal yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional, dan produksi minyak Indonesia. Adanya defisit anggaran masih menjadi problem utama kelangsungan APBN.

Defisit anggaran saat ini masih menjadi perhatian baik dinegara maju maupun negara sedang berkembang. Terutama di Indonesia, pemerintah Indonesia masih menghadapi masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan. Munculnya kekurangan dalam pendanaan di banyak negara merupakan hal yang klasik.

Defisit anggaran di negara Indonesia sejak tahun 2002 hingga 2022 secara keseluruhan terus mengalami kenaikan. Defisit anggaran mengalami perkembangan terendah pada tahun 2005 sebesar Rp 24,94 triliun akibat pengeluaran pemerintah tidak begitu signifikan. Dan pada tahun 2002-2007 fluktuasi pergerakan angka defisit anggaran relatif stabil.

Keadaan defisit anggaran pada tahun 2008 mencapai nilai Rp.95,5 triliun yang terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi adanya peningkatan yang signifikan yang dimulai dari tahun 2009 mencapai nilai Rp.129,84 triliun karena pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan infrastruktur. Kemudian pada tahun 2010-2020 defisit anggaran angkanya sudah mencapai 200 triliun lebih berdasarkan data kementerian keuangan.

Sebagaimana negara membangun, kebijakan fiskal yang dilaksanakan Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen anggaran defisit. Pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kelonggaran dana ke dalam masyarakat untuk mendorong perekonomian. Namun, kebijakan fiskal seringkali menjadi kurang efektif kalau tidak didukung oleh situasi atau kondisi yang tepat dan kebijakan lain yang konsisten, bahkan tidak mustahil kebijakan stimulus fiskal justru dapat menghambat laju perekonomian. Misalnya, stimulus fiskal yang semestinya akan meningkatkan agregate demand, namun bila tidak diimbangi kebijakan moneter yang akomodatif, justru dapat menyebabkan hasil yang kontra produktif. Persoalannya adalah bagaimana dapat menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman sehingga defisit tersebut masih dapat dicarikan pembiayaannya. (Kuncoro, 2011).

Perlu juga dipaparkan, terjadinya defisit anggaran diakibatkan oleh beberapa faktor penting adakalanya ia terjadi karena anggaran yang memang kurang, dan adakalanya pula cara atau metode pembiayaan yang

mengakibatkan defisit. Menurut Suharno (2008), terjadinya defisit anggaran dapat disebabkan oleh pengeluaran akibat krisis, pengeluaran karena inflasi, melemahnya nilai tukar, realisasi yang menyimpang dari rencana, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain pengeluaran akibat krisis, pengeluaran karena inflasi, melemahnya nilai tukar, pemerataan pendapatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Satrianto (2015) juga mengatakan terdapat faktor spesifik yang dapat menyebabkan defisit anggaran disuatu negara, diantaranya yaitu tingkat suku bunga dan nilai tukar.

Pertumbuhan ekonomi salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor-faktor produksi yang merangsang perkembangan ekonomi suatu Negara dalam skala besar yang dapat diukur dari perkembangan pendapatan riil yang dicapai Negara, secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminology Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB Riil) untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran. (Mankiw, 2006). Jika PDB meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi utamanya sektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pemerintah diharapkan akan mengakibatkan anggaran Indonesia menjadi surplus atau dengan kata lain, apabila anggaran mengalami defisit pada tahun sebelumnya, maka dengan peningkatan penerimaan perpajakan akan mengakibatkan defisit anggaran dapat menurun

pada periode tahun berikutnya, bahkan diharapkan dapat mengakibatkan anggaran surplus.

Selama kurun waktu 18 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif yang menunjukkan tren yang positif, meskipun sempat menurun sebesar 4,63% pada tahun 2009 akibat dampak dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Tetapi berkat pengalaman dari krisis pada tahun 1998 silam, Pemerintah telah mengupayakan empat langkah kebijakan, yaitu pemulihan permintaan swasta, pemulihan kepercayaan publik, pembenahan sistem perbankan yang efisien dan resolusi pada hutang korporat. Hasilnya adalah hingga tahun 2008, telah banyak kemajuan yang tercapai. Situasi tersebut antara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jalur di atas 6%. (*Worldbank, 2019*).

Selama tahun 2010, kinerja perekonomian domestik terus mengalami perbaikan walaupun berada di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan PDB yang meningkat tinggi dan surplus neraca pembayaran yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6.22%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2009 yang hanya mencapai 4.63%. Peningkatan tersebut didukung oleh sumber pertumbuhan yang semakin berimbang seperti pada peningkatan peran investasi dan kinerja ekspor yang meningkat. Namun sejak tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia kembali mengalami penurunan secara terus-menerus sampai tahun 2015 hingga sebesar 4,88%.

Inflasi pada tahun 2005 mencapai angka 17,11% itu merupakan angka tertinggi pada 16 tahun terakhir. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana jumlah uang yang beredar dalam masyarakat lebih besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa dalam masyarakat. Apabila terjadinya inflasi

maka adanya kenaikan harga-harga. Kenaikan harga ini akan mempengaruhi biaya pembangunan program yang semakin meningkat, dengan kondisi anggaran yang tetap sama. Sehingga anggaran negara perlu di revisi kembali agar adanya peningkatan kuantitas dan kualitas program. Akibatnya negara akan mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar harga (Anwar, 2014)

Suku Bunga tertinggi terjadi pada tahun 2002 sebesar 13,00% dan pada tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan dan fluktuatif. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi defisit anggaran ketika pemerintah melakukan pembiayaan utang dalam negeri melalui Surat Berharga Negara (SBN), baik berupa SUN maupun SBSN. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, pembayaran bunga pinjaman terhadap SBN yang diterbitkan juga akan meningkat, hal ini dapat menyebabkan beban anggaran negara bertambah (Satrianto 2015).

Nilai Tukar sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran Negara. Nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap mata uang dolar AS, maka utang yang akan dibayarkan membengkak dan akan membebankan anggaran (Kuncoro,2011). Selama kurun waktu 18 tahun terakhir nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap mata uang dolar AS. nilai tukar tertinggi terjadi pada tahun 2015 nilai tukar rupiah depresiasi sebesar Rp. 13.795.

Faktor penentu dan peran defisit anggaran selalu diperdebatkan, namun menghasilkan berbagai kesimpulan. Diantara mereka yang berkontribusi mengenai peran defisit anggaran antara lain adalah Hobbes (1651), yang memuji pemerintah sebagai penyedia layanan untuk kehidupan yang lebih layak. Ini selanjutnya didukung oleh Keynes (1936) yang berpendapat bahwa tanpa pemerintah, ekonomi akan gagal. Kustepeli (2005) mendukung karya Hobbes (1651) dan Keynes (1936) dengan menunjukkan bahwa peran pemerintah besar untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Ekonom lain yaitu Musgrave (1959) berpendapat bahwa pemerintah selalu menggunakan kerangka kebijakan fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Para ekonom mulai dari klasik sampai mereka yang memiliki pandangan pilihan publik, menentang penggunaan defisit anggaran untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Secara khusus Smith (1776), Ricardo (1817) dan Pigou (1912) mengemukakan bahwa ketidakstabilan dalam ekonomi diakibatkan oleh adanya campur tangan pemerintah. (Murwirapchena, dkk 2013).

Beberapa penelitian sebelumnya variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif terhadap defisit anggaran antara lain oleh Oladipo dan Akinbobola (2011), Jayid (2011), Satrianto (2015), Maltritz dan Wusthe (2015), Epaphra (2017), Yunus (2022) Namun penelitian yang lain menunjukkan pengaruh positif antara lain Murwirapachena, dkk (2013), Mushtaq (2013), Arif dan Hussain (2018). Selanjutnya variable Inflasi berpengaruh positif terhadap defisit anggaran oleh penelitian Salman A.S (2003), Eric R.O (2011), Lwangan dan Mawejje (2014), Satrianto (2015), Suryani (2017) dan Arif dan Hussain (2018). Sementara yang menunjukkan pengaruh negatif antara lain oleh Jayid, et.al (2011), Oladipo dan Akinbobola (2011), Mushtaq dan Khalid (2013), dan Yunus (2022).

Variabel suku bunga berpengaruh signifikan dan positif terhadap defisit antara lain Satrianto (2015) sementara hasil yang menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap defisit anggaran antar lain Riyadi (2010) dan Ratna (2015). Kemudian variabel nilai tukar berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran antara lain oleh Rosit (2010), Satrianto (2015), Epaphra M (2017) dan Yunus (2022), namun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif antara lain oleh Oladipo dan Akinbobola (2011), Mushtaq A dan Zaman K (2013).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan hasil yang belum konsisten terhadap faktor yang diduga mempengaruhi defisit anggaran dan juga indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja diatas, oleh sebab itu penulis tertarik menganalisis masing-masing faktor yang mempengaruhi defisit anggaran di Indonesia dengan judul penelitian "**Analisis Defisit Anggaran Belanja Negara Di Indonesia**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Defisit Anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020?
2. Apakah Suku bunga berpengaruh terhadap Defisit Anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020?

3. Apakah Nilai Tukar berpengaruh terhadap Defisit Anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020?
4. Apakah Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Defisit Anggaran Tahun 2002-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Inflasi berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap Defisit Anggaran melalui Pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020
2. Untuk menganalisis Suku bunga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap Defisit Anggaran melalui Pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020
3. Untuk menganalisis Nilai Tukar berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap Defisit Anggaran melalui Pertumbuhan ekonomi Tahun 2002-2020
4. Untuk menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Defisit Anggaran Tahun 2002-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Diharapkan menambah pengetahuan mengenai analisis Defisit anggaran belanja negara Indonesia
2. Sebagai bahan informasi dan referensi penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang analisis Defisit anggaran belanja negara Indonesia.

3. Diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal pengurangan defisit anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.11 Defisit Anggaran

Menurut Basri (2005:45), anggaran (*budget*) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Rahardja dan Manurung (2004) defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$). Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi. Besarnya defisit ditentukan dalam persentase terhadap PDB pada tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP RI Nomor 23 Tahun 2003, defisit anggaran pemerintah adalah selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam tahun anggaran yang sama. Anggaran pemerintah dapat defisit tidak melebihi 3 % dari PDB.

Menurut Suharno (2008), terjadinya defisit anggaran dapat disebabkan oleh pengeluaran akibat krisis, pengeluaran karena inflasi, melemahnya nilai tukar, realisasi yang menyimpang dari rencana, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Terjadinya defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan melakukan pinjaman utang dalam negeri dan utang luar negeri. dengan adanya pinjaman utang dari dalam negeri dan luar negeri tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncana sebelumnya. Tetapi utang

tersebut dapat menimbulkan masalah juga, karena baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri memerlukan pengembalian yang tentunya akan dapat mengurangi berbagai sumber keuangan negara (Rahman & Gemilang, 2017).

Terdapat beberapa definisi defisit. Secara konvensional, defisit dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Pengertian kedua adalah defisit moneter adalah selisih antara total belanja pemerintah (diluar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (diluar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah defisit operasional, yaitu defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Definisi yang terakhir adalah defisit primer. Defisit primer merupakan selisih antara belanja (diluar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu, masih terdapat beberapa definisi dari defisit dan sangat tergantung pada kriteria yang digunakan serta tujuan analisis. Biasanya pilihan konsep defisit yang tepat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain jenis ketidakseimbangan yang terjadi, cakupan pemerintah (pemerintah pusat, konsolidasi pemerintah, dan sektor publik), metode akuntansi (*cash dan accrual basis*), dan status dari *contingent liabilities* (Simanjuntak dalam Endah, 2010).

Secara umum defisit anggaran adalah kebijakan fiskal ekspansif pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian dan sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Selain itu definisi defisit anggaran juga bisa diartikan sebagai pertama adalah Defisit Konvensional, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah. Kedua adalah Defisit Moneter, yang merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang)

dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang). Pengertian ketiga adalah Defisit Operasional. Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal. Sedangkan pengertian keempat adalah Defisit Primer, Merupakan selisih antara belanja (di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan. Selain itu defisit anggaran juga dikelompokkan menjadi dua komponen yaitu komponen defisit primer dan komponen pembayaran bunga utang. Defisit primer didefinisikan sebagai selisih antara pengeluaran pemerintah (tidak termasuk pembayaran bunga utang) dengan seluruh penerimaan pemerintah (tidak termasuk utang baru dan pembayaran cicilan utang). Pengelompokan komponen defisit anggaran itu dimaksudkan untuk melihat peranan beban utang dalam anggaran pemerintah. Jika beban utang pemerintah, suku bunga pinjaman, dan kurs mata uang semakin tinggi maka pembayaran bunga utang juga akan semakin tinggi, selanjutnya defisit anggaran cenderung semakin tinggi. Pemerintah terpaksa menjalankan defisit anggaran yang lebih tinggi karena faktor pembayaran bunga utang. (Dornbusch, 1990). Berbagai kebijakan fiskal mempunyai saluran yang bervariasi, yang mana, seluruh kebijakan fiskal ini dapat dilaksanakan melalui jalur kebijakan anggaran pemerintah (kalau di Indonesia dikenal dengan APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didefinisikan sebagai suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun (Suparmoko, 2000).

APBN dapat dijadikan tolak ukur kinerja dari pelaksanaan kebijaksanaan anggaran pemerintah. Apabila terjadi defisit dalam anggaran, ini menunjukkan semakin kecilnya peranan dan kemandirian pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Selama tahun anggaran 1969/1970 sampai dengan 1999/2000, APBN menggunakan sistem anggaran berimbang

dengan format T-account. Dalam sistem anggaran berimbang, jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh oleh negara. Pada kenyataannya, jumlah pengeluaran selalu lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara, oleh karena pengeluaran berorientasi pada pembangunan yang selalu meningkat. Sementara itu, penerimaan selalu dihadapkan pada sumber-sumber penerimaan yang terbatas. Akibatnya, harus ada sumber lain untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan penerimaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk memakai komponen utang luar negeri sebagai penyeimbang anggaran, sehingga konsep keseimbangan dalam sistem anggaran berimbang menjadi semu. Konsep anggaran berimbang diperkenalkan untuk mencegah terulangnya trauma hiperinflasi pada masa Orde Lama. Sebagai perbandingan, pada masa Orde Lama, defisit APBN ditutup dengan cara pencetakan uang, sehingga jumlah uang beredar menjadi tidak terkendali. Akibatnya pada tahun 1965 terjadi hiperinflasi sebesar 650 persen.

Sedangkan pada sistem anggaran berimbang, pembiayaan defisit dilakukan dengan pinjaman luar negeri, tidak boleh lagi dengan cara pencetakan uang. Namun dalam perkembangannya, sistem ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, sistem ini memicu meningkatnya pinjaman luar negeri. Kedua, sistem ini memicu inefisiensi. Pendapatan negara yang meningkat akan mendorong peningkatan dalam pengeluaran negara. Sementara itu, pembiayaan defisit melalui pinjaman luar negeri mendorong godaan untuk tetap menambah pengeluaran pada waktu perekonomian mengalami boom dan godaan untuk tetap mempertahankan ataupun memperbesar pengeluaran pada waktu resesi. Sejak tahun 2000, APBN menganut sistem anggaran defisit dengan format I-account. Pada sistem ini,

pembiayaan defisit dilakukan melalui sumber sumber dari dalam dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset, dan privatisasi, sedangkan pembiayaan luar negeri tetap melalui pinjaman luar negeri. Format I-account dengan jelas membedakan antara pinjaman luar negeri, pembayaran cicilannya, dan hibah. Dalam format baru ini, pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, tidak lagi dimasukkan ke dalam pos penerimaan. Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dan Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

Kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN. Dimana APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat Disamping Pemerintah melakukan pengeluaran, pemerintah juga memperoleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah merupakan suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Kebijakan-kebijaksanaan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara) adalah kebijaksanaan fiskal (Mangkoesoebroto, 1997). Lebih lanjut Mangkoesoebroto (1997) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh sebelum realisasinya. Pemerintah membuat daftar anggaran rencana pengeluaran setiap tahunnya, di Indonesia dijabarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya Budiono (1999) dalam Prasetya (2012) menjelaskan pengeluaran pemerintah tersebut dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai dari pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah. Menurut teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah tersebut terdiri atas tiga pos utama yang digolongkan sebagai

berikut pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai membawa pengaruh terhadap proses makro ekonomi. Perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. Dan Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar melainkan pencatatan pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya dalam hal misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada beberapa golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, transfer payment memiliki status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai walaupun secara administrasi keduanya berbeda.

Pengaruh defisit anggaran terhadap suatu perekonomian negara merupakan salah satu isu yang kontroversial. Sudut pandang pertama berpendapat defisit anggaran yang dibiayai oleh utang pemerintah dapat menyebabkan dampak seperti pengangguran, inflasi, tingginya suku bunga dan memburuknya nilai tukar suatu negara. Sedangkan sudut pandang kedua berpendapat bahwa defisit anggaran tidak memiliki dampak terhadap perekonomian. (Solikin, 2003).

Defisit anggaran dapat ditutupi melalui pajak atau utang. Namun secara teori, terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih cara yang terbaik untuk menutupi defisit tersebut, di antaranya sebagai Prinsip penerima manfaat (Benefits-received principle). Menurut prinsip normatif ini, seseorang yang menerima manfaat dari program pengeluaran pemerintah harus membayar. Maka apabila program tersebut membawa manfaat bagi generasi mendatang, tidak salah apabila bebannya dialihkan juga kepada generasi mendatang melalui pembiayaan dengan utang.

Kesetaraan antar-generasi (Intergenerational equity) Apabila akibat perkembangan teknologi dapat diperkirakan bahwa generasi mendatang akan lebih makmur dibandingkan generasi saat ini, adalah hal yang logis untuk mentransfer pendapatan dari generasi mendatang ke generasi saat ini dengan berutang. Sedangkan apabila akibat kelangkaan sumber daya tak terbaharukan dapat diperkirakan bahwa generasi mendatang akan lebih miskin dibandingkan generasi saat ini, lebih baik meningkatkan pajak.

Pertimbangan efisiensi Perlu diketahui bahwa setiap peningkatan belanja pemerintah akan dibiayai dengan pajak. Pilihan antara pembiayaan dengan pajak atau utang hanya masalah waktu pembayarannya, karena utang pun harus ditutupi dengan peningkatan pajak di masa depan, namun pembayarannya dicicil. Dari sisi efisiensi, pertimbangan antara pembiayaan dengan pajak atau utang dapat dilakukan dengan melihat yang mana yang memberikan lebih banyak kelebihan beban (*excess burden*).

Menurut Elmendorf dan Mankiw (dalam Rosen, 2002), apabila pembiayaan defisit dilakukan dengan meningkatkan pajak pendapatan, maka akan mempengaruhi perilaku penawaran tenaga kerja, dengan menimbulkan kelebihan beban yang berhubungan proporsional dengan nilai kuadrat dari tingkat pajak. Artinya apabila tingkat pajak bertambah dua kali lipat, maka kelebihan beban akan bertambah empat kali lipat. Dengan demikian, lebih efisien bila meningkatkan utang, yang berarti mencicil pembayaran pajak dalam nominal yang lebih kecil, daripada meningkatkan pajak. Namun di sisi lain, meningkatkan utang berarti mengurangi stok modal, sehingga menambah kelebihan beban. Artinya, dari sisi penawaran tenaga kerja, lebih efisien bila berutang, tetapi dari sisi alokasi modal, lebih efisien bila meningkatkan pajak.

Pertimbangan makroekonomi dalam model makroekonomi Keynesian, pertimbangan antara pembiayaan defisit dengan pajak atau utang tergantung pada tingkat pengangguran. Apabila tingkat pengangguran rendah, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan inflasi. Maka diperlukan untuk mengurangi kemampuan belanja sektor swasta dengan meningkatkan pajak. Namun apabila tingkat pengangguran tinggi, lebih baik bila pemerintah berutang agar dapat merangsang permintaan masyarakat. Penggunaan pajak atau utang untuk menjaga tingkat permintaan agregat ini juga sering disebut *functional finance*.

Pertimbangan moral dan politik, moral mengandung unsur pengendalian diri, sedangkan utang terjadi karena kekurangan pengendalian diri, sehingga dapat dikatakan bahwa utang adalah hal yang tidak bermoral. Asumsi normatif bahwa utang adalah tidak bermoral selalu menjadi bahan diskusi politik yang cukup menarik. Padahal pandangan normatif tersebut bergantung pada hipotesis positif yang masih belum bisa dibuktikan, yakni bahwa beban utang dialihkan kepada generasi mendatang. Terlebih lagi, pandangan normatif ini tidak lebih superior dibandingkan dengan, misalnya, *benefits-received principle* yang menyatakan bahwa berutang adalah hal yang secara moral pantas untuk dilakukan. (Simbolon, 2012).

Beberapa teori mengenai defisit anggaran sebagai berikut yang pertama Teori Ricardian, dengan teorinya Ricardian Equivalence (RE) berpendapat bahwa ada hubungan kekeluargaan yang erat antar generasi. Dalam kondisi tersebut konsumsi ditentukan oleh seluruh sumber daya yang dimiliki oleh keluarga besar sepanjang masa. Defisit anggaran pada dasarnya hanyalah pengalihan beban pajak dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Beban pajak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang tetap menjadi beban keluarga besar tersebut. Bagi keluarga besar

tersebut, defisit anggaran tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa terhadap perekonomian. Teori *Ricardian Equivalence* pada dasarnya merupakan pengembangan teori pendapatan permanen dan hipotesis siklus hidup (*Permanent Income and Life Cycle Hypothesis* atau PILCH). Di dalam teori *Ricardian Equivalence* variable belanja pemerintah, pajak dan utang pemerintah yang tidak ada dalam teori PILCH diintroduksikan dalam model. Kesimpulan penting dari teori *Ricardian Equivalence* adalah bahwa kebijakan defisit anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, termasuk di dalamnya tingkat konsumsi, investasi, suku bunga, dan tingkat harga. Teori *Ricardian Equivalence* mendapat banyak kritikan, karena dalam kenyataannya defisit anggaran mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Kedua Teori Neoklasik, mencoba mendalami efek defisit anggaran terhadap perekonomian. Kelompok Neoklasik lebih menekankan pembahasan pada efek dari defisit yang permanen. Model Neoklasik yang standar mendasarkan diri pada tiga karakter pokok, (Bernheim, 1989) karakter tersebut yaitu pelaku ekonomi memiliki masa hidup yang terbatas (*finite horizon*), tingkat konsumsi optimal ditentukan oleh solusi optimasi antar waktu (*intertemporal intimization*), Setiap periode waktu terjadi keseimbangan pasar Model Neoklasik serupa dengan model Ricardian.

Dalam model Ricardian satu pelaku ekonomi hidup sepanjang masa, sedangkan dalam model Neoklasik ada dua pelaku ekonomi yang hidup dalam periode yang berbeda. Kedua model mempunyai hubungan intertemporal. Hubungan intertemporal dalam model Ricardian menunjukkan hubungan antara kepentingan pelaku ekonomi di masa muda dan di masa tua, sedangkan dalam model Neoklasik menunjukkan hubungan antara kepentingan generasi muda dan generasi tua. Implikasi perbedaan kedua

model tersebut cukup berarti. Dalam model Ricardian hanya ada satu pelaku ekonomi yang hidup sepanjang masa. Fungsi utilitas mewakili utilitas individual. Kerugian di masa sekarang diupayakan terkompensasi sepenuhnya oleh keuntungan di masa yang akan datang. Utilitas marginal pada masa sekarang akan berhubungan langsung dengan utilitas marginal yang akan datang. Kenaikan pajak di masa yang akan datang akan dikompensasi secara penuh dengan pengurangan tingkat konsumsi dan peningkatan tabungan di masa sekarang.

Dalam model Neoklasik, terdapat dua pelaku ekonomi atau lebih yang hidup dalam periode waktu yang berbeda. Hubungan intertemporal tidak seerat jika hanya ada satu pelaku ekonomi. Sangat mungkin pelaku ekonomi di masa sekarang tetap peduli terhadap pelaku ekonomi dari generasi penerus, tetapi tidak sepenuhnya. Jika pelaku ekonomi yang hidup pada masa sekarang sangat altruis, maka seperti hasil penelitian Barro (Barro, 1989) kedua model akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Uraian diatas juga sekaligus menjelaskan ciri kedua bahwa tingkat konsumsi ditentukan oleh proses optimasi antar waktu. Kaum Neoklasik tidak mengelak bahwa hubungan antargenerasi walau kecil tetapi selalu ada. Secara umum kaum Neoklasik berpendapat bahwa deficit anggaran akan merugikan perekonomian. Menurut (Bernheim, 1989) kelemahan teori Neoklasik dalam hal dampak defisit anggaran serupa dengan teori *Ricardian Equivalence*, kecuali bahwa pelaku ekonomi tidak lagi tunggal, serta hidup dalam kurun waktu yang terbatas. Kesimpulan teori defisit anggaran kelompok Neoklasik akan sama dengan kesimpulan teori *Ricardian Equivalence*, jika pelaku ekonomi altruistis. (Barro, 1989)

Teori Keynesian Kelompok ketiga adalah kaum Keynesian yang berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian.

Kelompok Keynesian mengasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka pendek (*myopic*), hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu dalam posisi keseimbangan. Salah satu ketidakseimbangan terjadi di pasar tenaga kerja, dan dalam perekonomian selalu terjadi pengangguran. Menurut kaum Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dan konsumsi pada giliran berikut. Defisit anggaran yang dibiayai dengan utang yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi lebih ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan. Peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan kerja penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong peningkatan produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional. Pada periode selanjutnya peningkatan pendapatan nasional akan mendorong perekonomian melalui efek multiplier Keynesian. Karena defisit anggaran meningkatkan konsumsi dan tingkat pendapatan sekaligus, tingkat tabungan dan akumulasi kapital juga meningkat. Menurut kaum Keynesian secara keseluruhan, defisit anggaran dalam jangka pendek akan menguntungkan perekonomian. Model analisis Keynesian itu mendapat kritikan tajam dari kelompok Klasik Baru (New Classical). Kritik kelompok Klasik Baru itu terutama berkaitan dengan analisis Keynesian yang tidak rasional, tidak-konsisten dan target kebijakan yang sembarang. Analisis Keynesian dikatakan tidak rasional karena perilaku pelaku ekonomi tidak berubah dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang berubah. Model Keynesian yang memfokuskan diri pada hubungan struktural yang statis tidak didasarkan pada perilaku individual pelaku ekonomi yang cenderung melakukan optimasi dalam mengambil keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi Keynesian hanya didasarkan pada kondisi perekonomian

pada saat itu (statis), dan tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Target kebijakan ekonomi mestinya diformulasikan dalam konteks kesejahteraan masyarakat, bukan dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, stabilitas kurs. Kritik kelompok Klasik Baru terhadap teori Keynes itu dijawab oleh kelompok Keynes Baru (New Keynesian) dengan mengintroduksi teori optimasi untuk penurunan modelnya (*microfoundation*), dengan tetap mempertahankan kondisi ketidaksempurnaan di pasar tenaga kerja, dan adanya pengangguran. Dalam model-model kelompok Keynes baru, model diturunkan dari perilaku pelaku ekonomi yang melakukan optimasi. Model tidak hanya statis tetapi juga dinamis, bahkan mengadopsi rasional expectation (asa nalar). Akan tetapi dalam model-model Keynes Baru, tetap dimungkinkan adanya perbedaan gaji antar sektor, dan adanya pengangguran, yang mengindikasikan ketidaksempurnaan pasar.

Menurut (Barro, R. 1989) penyebab terjadinya defisit anggaran, yaitu Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Negara memang di bebani tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.

Pemerataan Pendapatan Masyarakat Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk pemerataan pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah yang miskin dan terpencil, agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju.

Melemahnya Nilai Tukar bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan mata uang negara peminjam tersebut. Misalnya apabila nilai tukar rupiah depresiasi terhadap mata uang dollar AS, maka pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang akan dibayarkan juga membengkak. Sehingga pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula.

Pengeluaran Akibat Krisis Ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektorsektor ekonomi sebagai dampak krisis itu, padahal negara harus bertanggung jawab untuk menaikkan daya beli masyarakat yang tergolong miskin. Dalam hal ini negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah pedesaan yang miskin itu.

Realisasi yang Menyimpang dari Rencana Apabila realisasi penerimaan negara meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan proyek atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, negara harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

Pengeluaran karena inflasi penyusunan anggaran negara pada awal tahun, didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Harga

standar itu sendiri dalam perjalanan tahun anggaran, tidak dapat dijamin ketepatannya. Dengan kata lain, selama perjalanan tahun anggaran standar harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Semuanya ini akan berakibat pada menurunnya kuantitas dan kualitas program, sehingga anggaran negara perlu direvisi. Akibatnya, negara terpaksa mengeluarkan dana dalam rangka menambah standar Harga.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono dalam Saerofi, 2005). Mahalli (2010), menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Suatu Negara dapat dikatakan memiliki kondisi perekonomian yang baik melalui perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau secara sederhana diukur dari peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dikenal dengan terminology Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan PDB berdasarkan harga konstan (PDB Rill) untuk mengeliminasi pengaruh perubahan harga selama periode waktu pengukuran. PDB diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang di produksi oleh suatu

negara dalam periode tertentu (Mankiw, 2006). Pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan masyarakat suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Kusumo, 2007).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja, pendidikan dan keterampilan (Sukirno, 2006).

Proses pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, modal dan teknologi yang disebut faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, keadaan politik dan nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang yang disebut faktor non ekonomi (Jhingan, 2001).

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2003), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi

keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Menurut Kuznet dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Peacock dan Wiseman (Basri, 2005:40), bila produk domestik bruto meningkat maka akan berdampak kepada peningkatan kegiatan ekonomi utamanya sektor riil dan dunia usaha pada umumnya. Peningkatan kegiatan ekonomi akan membawa pengaruh peningkatan penerimaan pemerintah melalui perpajakan, karena bergairahnya perekonomian sehingga aktivitas dunia usaha meningkat dan pada akhirnya keuntungan perusahaan meningkat pula. Peningkatan aktivitas dan keuntungan perusahaan ini tentunya akan meningkatkan perpajakan baik dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai maupun cukai. Penerimaan perpajakan merupakan pos utama dalam penerimaan dalam negeri. Dengan peningkatan penerimaan perpajakan, diharapkan akan mengakibatkan anggaran Indonesia menjadi surplus atau dengan kata lain, apabila anggaran mengalami defisit pada tahun sebelumnya, maka dengan peningkatan penerimaan perpajakan akan mengakibatkan defisit anggaran dapat menurun pada periode tahun berikutnya, bahkan diharapkan dapat mengakibatkan anggaran surplus. Upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar mengingatkan kita

sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah (Sukirno, 2008).

Inti dari pertumbuhan Harrod-Domar adalah suatu realisasi jangka pendek antara peningkatan investasi (pembentukan capital) dan pertumbuhan ekonomi. Dua variabel fundamental dari model ini adalah pembentukan capital atau investasi dan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Jika Y = output, K = stok kapital dan I = investasi, maka ICOR adalah $\Delta K/\Delta Y$, penambahan kapital dibagi pertumbuhan output, sama seperti $I/\Delta Y$, sejak $\Delta = I$ dalam definisi. Model Harrod-Domar ini adalah modifikasi yang didasari pada model masing-masing dari Domar dan Harrod. Model ini lebih memfokuskan pada laju pertumbuhan investasi $\Delta I/I$. Terdapat dalam model, investasi (I) ditetapkan harus tumbuh atas suatu persentase konstan, sejak marginal propensity to saving, yakni rasio dari pertumbuhan tabungan (S) terhadap peningkatan pendapatan (Y) dan ICOR keduanya konstan.

Teori Harrod-Domar ini memperlihatkan kedua fungsi dari pembentukan modal dalam kegiatan ekonomi. Teorinya, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila suatu masa tertentu dilakukan pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang, selain itu Harrod-Domar menganggap pula bahwa pertambahan dalam kesanggupan memproduksi itu tidak sendirinya menciptakan pertambahan produksi dan kenaikan pendapatan nasional.

Teori Harrod Domar menjelaskan bahwa pendapatan nasional akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi barulah akan tercipta apabila kapasitas produksi bertambah dan pengeluaran masyarakat mengalami kenaikan

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ada beberapa pemisalan yang digunakan, yaitu Pada tahap pemulaan perekonomian telah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan alat-alat modal yang tersedia dalam masyarakat sepenuhnya digunakan. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak termasuk. Besarnya tabungan masyarakat adalah proposional dengan pendapatan nasional dan keadaan ini berarti fungsi tabungan dinilai dari titik nol. Kecondongan menabung besarnya tetap dan begitu juga perbandingan diantara modal dengan jumlah produksi yang lazim disebut rasio modal produksi (*Capital Output Ratio*) dan perbandingan diantara pertambahan modal dengan jumlah pertambahan produksi yang lazim disebut rasio pertambahan modal produksi (*Incremental Capital Output Ratio*). (Nurhakim, 2019)

Teori Two Gap Model Secara teoretis, kebijakan ekonomi di negara-negara sedang berkembang muncul karena adanya asumsi bahwa pasar gagal melaksanakan fungsinya (*market failure*) sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah. Namun menurut Weiss (1995), jika kebijakan pemerintah tersebut tidak diarahkan dengan baik maka justru akan mendorong munculnya kegagalan pemerintah (*government failure*). Kerangka teori Two Gap Model menunjukkan bahwa defisit pembiayaan investasi swasta terjadi karena Tabungan lebih kecil dari Investasi ($I-S = \text{resource gap}$), dan defisit perdagangan disebabkan karena Ekspor lebih kecil dari Impornya ($X-M = \text{trade gap}$). Disamping itu, masih ada defisit dalam anggaran pemerintah karena penerimaan pemerintah dari pajak lebih kecil dari pengeluaran pemerintah ($T-G = \text{fiscal gap}$).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pinjaman luar negeri merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembiayaan

pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan demikian besar tetapi sumber dana dalam negeri masih relatif terbatas. Pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk menutupi selisih tabungan dalam negeri dengan investasi dan menutup kebutuhan devisa akibat selisih tabungan ekspor dan impor. Adanya pinjaman luar negeri memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran lebih tinggi dari yang dapat dilakukan. Jika pinjaman tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka pinjaman tersebut akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya jika tidak dialokasikan dan dikelola secara tepat, pinjaman luar negeri akan menimbulkan masalah terhadap manajemen ekonomi makro dalam bentuk beban pembayaran utang yang sangat tinggi. Kebutuhan dana dalam pembangunan ekonomi pada umumnya berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dana dari luar negeri dapat berupa penanaman modal asing (PMA) maupun berupa utang luar negeri. Kebutuhan akan modal asing dan utang luar negeri itu didasarkan atas adanya apa yang disebut dengan problem dua jurang (two gap problem), yang disebut model Chenery and Strout (1966). Problem tersebut adalah Pertama, Jurang saving (saving gap). Negara sedang berkembang dengan pendapatannya yang rendah menyebabkan saving masyarakat rendah. Tetapi pada sisi lain negara tersebut membutuhkan pembangunan ekonominya yang tinggi dengan investasi yang besar-besaran. Sehingga ada gap antara kebutuhan tabungan sebagai sumber pendanaan dengan kebutuhan untuk investasi. Dengan demikian pada posisi seperti itu memang pembiayaan yang dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi negara berkembang, baik utang luar negeri maupun pembiayaan dari modal asing sangat diperlukan. Kedua, Jurang devisa (foreign exchange gap).

Kebutuhan devisa untuk mengimpor sebagai barang modal untuk menggerakkan industri dalam negeri di negara sedang berkembang sangat tinggi, dilain pihak devisa negara terbatas karena ekspor pada umumnya masih relative rendah. Dengan demikian untuk menutup kebutuhan devisa itu diperlukan adanya utang maupun penanaman modal asing. (Easterly, 2003)

2.1.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung meningkat. Penyebab inflasi itu adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi yang menyebabkan harga menjadi naik (*demand pull inflation*), inflasi juga dapat terjadi atau datang dari sisi penawaran, yakni kenaikan biaya produksi sehingga harga naik (*cost push inflation*). (Sukanto, 2015). Selain itu inflasi dapat juga terjadi karena harga barang-barang meningkat sedangkan tingkat upah masyarakat tetap. (Sari & Natha, 2016).

Pada teori inflasi dijelaskan bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan barang tersedia (teori kuantitatif uang) dan masyarakat ingin berada di luar batas kemampuan ekonominya (teori Keynes).(Sukirno, 2015).Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa akan mengakibatkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadikan permintaan menurun dan produksi menjadi ikut menurun. Output riil menjadi rendah yang akhirnya akan berdampak pada turunnya PDB riil suatu negara dan pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh sehingga menjadi rendah. Selanjutnya, pendapatan negara akan menurun dan membawa konsekuensi naiknya defisit anggaran karena dengan pendapatan yang menurun negara harus tetap menyediakan kebutuhan publik rakyatnya.

Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek-aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Ketiga teori inflasi menurut Boediono (2005) dijelaskan sebagai berikut yang Pertama Teori Kuantitas, teori ini dikenalkan oleh Irving Fisher, menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga. Kedua teori Keynes. Dalam teori Keynes, inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang hidup diluar dari batas ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk keinginannya dapat terpenuhi. Ketiga Teori Strukturalis, teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi "jangka panjang". Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, antara lain Ketidak-elastisan penerimaan ekspor dan Ketidak-elastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

2.1.4 Suku Bunga

Tingkat bunga adalah "harga" dari penggunaan uang atau dapat dipandang sebagai "sewa" atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Beberapa teori yang membahas suku bunga misalnya Teori Klasik berpendapat pengertian suku bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana

investasi. Untuk menentukan tingkat investasi oleh investor asing melalui PMA maka tingkat bunga yang berlaku di luar negara secara internasional sangat berpengaruh sekali dalam hal pengembalian keputusan dalam menanamkan modalnya di suatu negara, sehubungan dengan alternative keuntungan yang akan dinikmati oleh investor, apakah menanamkan uang di bank dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada investasi karena keuntungan pengembalian modalnya lebih rendah demikian sebaliknya.

Teori Keynes berpendapat suku bunga bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi investasi, selain itu masih ada situasi kelesuan kegiatan ekonomi yang menciptakan ekspektasi keuntungan bisnis yang kurang menggembirakan sehingga menyebabkan rendahnya investasi meskipun suku bunga rendah. (Todaro M. 1998)

Setelah membahas pengertian dari tingkat bunga pasti tidak akan terlepas dari bunga kredit. Suku bunga kredit sendiri yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang, atau jumlah tambahan yang harus dibayarkan demi hak istimewa untuk menggunakan uang pinjaman dalam bentuk kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Adapun cara untuk menentukan perhitungan bunga kredit tersebut yaitu Sliding Rate yaitu pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan semakin menurun dari bulan ke bulan atau dari suatu periode ke periode selanjutnya sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman, Flate Rate yaitu cara perhitungan bunga dengan rumus pembedaan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari satu periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman, Floating Rate yaitu cara perhitungan bunga dengan cara bunga

mengambang, maksudnya yaitu penentuan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk jangka waktu tertentu tetapi diambang sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada dipasar uang (money market rate). Tingkat bunga tersebut dapat ditetapkan dengan cara domestic money market maupun international money market rate. Hubungan suku bunga dengan defisit anggaran secara langsung, dapat dilihat melalui pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara sesuai masa berlakunya. Apabila suku bunga naik, maka beban pembayaran bunga dan pokoknya terhadap SBN yang diterbitkan akan meningkat. Hal ini secara langsung akan menambah beban anggaran sehingga dapat membuat defisit anggaran meningkat (Lestari, 2011).

2.1.5 Nilai Tukar

Kurs dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, dengan kata lain kurs valuta asing adalah harga dari satu unit mata uang asing atau perbandingan harga antara valuta bila terjadi pertukaran. Dalam hal ini kurs rupiah terhadap dollar AS dinyatakan dalam Rupiah/Dollar (Widhiyanto, 2006).

Nilai tukar yaitu harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) suatu negara sebagai jumlah satuan mata uang domestik yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. (Levi, 2001). Para ekonom membedakan nilai tukar atau kurs menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal yaitu harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan nilai tukar

riil yaitu nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relative (harga dalam negeri dibandingkan dengan harga luar negeri).

Peningkatan mata uang domestik terhadap mata uang asing disebut apresiasi/revaluasi, sedangkan turunnya mata uang domestik terhadap mata uang asing disebut depresiasi/devaluasi. Apresiasi atau depresiasi tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang diumumkan kepada publik untuk menaikkan atau menurunkan nilai tukar terhadap mata uang asing. Kebijakan revaluasi atau devaluasi tersebut biasanya dilakukan untuk mempertahankan kinerja perdagangan luar negeri suatu negara.

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sedangkan dalam sistem mata uang mengambang, nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran valuta asing terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam permintaan dan penawaran dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai-nilai mata uang yang bersangkutan. Dalam hal ini permintaan terhadap valuta asing relatif meningkat terhadap mata uang domestik. Jadi mata uang domestik menurun.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi permintaan valuta asing yaitu pertama, faktor Pembayaran Impor Semakin tinggi impor barang dan jasa maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar mata uang akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor menurun maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Kedua faktor aliran modal keluar (*Capital Outflow*) semakin besar modal keluar maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada akhirnya akan melemahkan nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga kegiatan

spekulasi semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga melemahkan nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing dapat ditentukan melalui mekanisme yaitu Pertama Sistem Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate*) harga mata uang ditentukan tanpa memperhatikan tarik menarik pasar. Hal itu membuat Bank Sentral dalam negeri harus siap menerima segala resiko untuk mempertahankan nilai kurs yang sudah disepakati. Saat terjadi depresiasi, Bank Sentral harus menguras cadangan devisanya melalui penjualan mata uang asing untuk mempertahankan nilai mata uang domestik. Sehingga menyebabkan munculnya pasar gelap (black market). Pasar gelap tersebut menjadikan mata uang diperjualbelikan bukan pada nilai yang sebenarnya sehingga akan menguntungkan negara lain. Kedua Sistem Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rate*) nilai mata uang dibiarkan mengambang, sehingga nilai mata uang yang tercermin adalah nilai mata uang sebenarnya. Hal ini merupakan hasil dari tarik-menarik permintaan dan penawaran. Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun (terdepresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak dan hal ini akan membebani anggaran karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari anggaran bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri akan melonjak (Kuncoro, 2011). Dengan demikian, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit anggaran negara.

Nilai tukar riil lebih memperlihatkan daya saing suatu produk dalam perdagangan internasional sebab nilai tukar riil diperoleh dari perhitungan nilai tukar nominal dan tingkat harga pada kedua negara. Apabila nilai tukar riil tinggi, harga barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang dalam negeri relatif mahal. Begitupula sebaliknya, jika nilai tukar riil rendah maka barang-barang luar negeri relatif mahal dan barang-barang dalam negeri relatif murah (Mankiw, 2000).

Apabila kondisi ekonomi suatu negara mengalami perubahan, maka akan diikuti dengan perubahan nilai tukar secara substansional, sehingga akan memunculkan masalah transaksi dengan negara lain, masing - masing negara menggunakan mata uang yang berbeda (Saputra & Dharmadisaksa, 2016).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Keterkaitan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit Anggaran

Menurut perspektif ahli moneter, penawaran uang akan mendorong inflasi. Jika kebijakan moneter diterapkan terhadap defisit anggaran, penawaran uang terus meningkat dalam waktu yang lama. Permintaan agregat meningkat sebagai hasil dari pembiayaan defisit ini, yang menyebabkan output meningkat di atas tingkat output alamiah. Permintaan tenaga kerja yang meningkat akan menaikkan upah, yang pada gilirannya menyebabkan pergeseran penawaran agregat ke arah menurun. Setelah kurun waktu tertentu ekonomi kembali ke tingkat output alami. Akan tetapi, ini terjadi dengan biaya pada tingkat harga lebih tinggi secara permanen. Dalam model ahli moneter (*dan neo-klasik*), perubahan tingkat inflasi sangat tergantung pada perubahan penawaran uang. Umumnya, defisit anggaran tidak menyebabkan tekanan yang bersifat inflasi, tetapi mempengaruhi tingkat harga melalui dampaknya pada agregat uang dan ekspektasi publik, yang

pada gilirannya memicu pergerakan harga. Hubungan sebab-akibat penawaran uang didasarkan pada teori uang terkenal Milton Friedman, yang menyatakan bahwa inflasi kapan saja dan di mana saja selalu merupakan fenomena moneter.

Teori tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan harga secara terus menerus dan menetap selalu didahului atau disertai dengan peningkatan berkelanjutan dalam penawaran uang. Ekspektasi hubungan sebab-akibat bekerja melalui kendala anggaran antar waktu, yang mengimplikasikan bahwa pemerintah harus mengalami defisit masa sekarang, dan pada masa mendatang akan mengalami surplus anggaran (Walsh, 1998). Satu cara yang mungkin untuk menghasilkan surplus adalah dengan meningkatkan pendapatan dari pencetakan uang (seignorage), sehingga publik mungkin mengharapkan pertumbuhan uang masa mendatang. Hubungan defisit inflasi juga dibahas dengan mempertimbangkan efek langsung inflasi pada utang yang belum dilunasi, pendapatan pajak dan pembelanjaan pemerintah. Interaksi dinamis antara defisit pemerintah dan inflasi bisa berlangsung dalam salah satu dari dua arah. Efek inflasi mengurangi nilai riil utang yang menonjol, atau inflasi memperburuk posisi fiskal pemerintah disebabkan keterlambatan penagihan, yang mengurangi pendapatan riil pemerintah (Dornbusch, 1990). Penurunan pendapatan itu sendiri diterima sebagai faktor pendukung dalam proses inflasi oleh peningkatan penawaran uang untuk membiayai defisit yang dipicu inflasi ini (Tanzi, 1991; Aghevli & Khan, 1978).

Di lain pihak, Aghevli dan Khan (1978), Ahking dan Miller (1985), Barnhart dan Darrat (1988), Hondroyiannis dan Papapetrou (1997) menemukan hubungan sebabakibat dua-arah antara defisit dan inflasi. Sebagian besar studi empiris menyesuaikan pendekatan ad hoc dengan menggunakan teknik ekonometrika.

Tampaknya hubungan “defisit anggaran-inflasi” ternyata menunjukkan interaksi dua-arah, yaitu bukan hanya defisit anggaran melalui dampaknya pada uang dan ekspektasi menimbulkan tekanan inflasi, tetapi inflasi yang tinggi juga kemudian mempunyai efek feedback yang mendongkrak defisit anggaran. Pada dasarnya, proses ini bekerja melalui keterlambatan yang signifikan dalam penagihan pajak.

Masalahnya terletak pada fakta bahwa saat pengumpulan pajak dan saat pembayaran yang seharusnya dilakukan tidak bertepatan dengan pembayaran yang biasanya dilakukan di hari kemudian. Menurut pandangan ini, inflasi tinggi selama keterlambatan waktu seperti ini akan mengurangi beban pajak riil. Karena itu mungkin dialami fenomena penguatan-sendiri sebagai berikut: berlarut-larutnya defisit anggaran menjadikan inflasi membubung tinggi, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan pajak riil; kemudian penurunan dalam pendapatan pajak riil mengharuskan peningkatan lebih jauh pada defisit anggaran dan seterusnya. Dalam literatur ekonomi ini biasanya disebut sebagai efek *Olivera-Tanzi*. Seperti yang ditunjukkan Sachs dan Larain (1993), bukti dari negara-negara sedang berkembang pada tahun 1980-an menguatkan kesimpulan bahwa proses penguatan-sendiri ini juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Beberapa peneliti juga mengajukan bahwa pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan akumulasi utang domestik ternyata hanya menangguhkan pajak inflasi. Jika pemerintah menalangi defisit anggarannya dengan mencetak uang sekarang, maka di masa mendatang beban menangani stok utang pemerintah yang sudah ada sebelumnya akan lebih mudah. Pembayaran bunga yang menambah pengeluaran pemerintah di periode berikutnya tidak akan menimbulkan tekanan tambahan pada otoritas fiskal dan defisit tidak akan meningkat seiring berjalannya waktu. Seperti yang

ditegaskan Sachs dan Larrain (1993), “meminjam hari ini bisa menangguhkan inflasi, tetapi dengan risiko inflasi yang bahkan lebih tinggi di masa mendatang”. Sargent dan Wallace (1981) mengamati bahwa bila otoritas fiskal menetapkan anggaran secara tersendiri, otoritas moneter hanya bisa mengontrol ketepatan-waktu inflasi. Baru-baru ini muncul teori dengan arah baru, yang juga bisa dipandang sebagai perluasan dari hipotesa inflasi ditangguhkan. Menurut teori fiskal baru tentang tingkat harga (lihat Komulainen & Pirttila, 2000 dan Carzoneri, Cumby & Diba, 1998) ada dua aturan untuk penentuan harga. Yang pertama disebut dengan rezim “dominan moneter”, dimana kebijakan moneter menentukan tingkat harga, dan kebijakan fiskal akan bereaksi terhadap kebijakan moneter. Pemerintah menyeimbangkan batasan antar-waktunya dengan menerima inflasi sebagaimana terjadi. Sebaliknya, dalam rezim “dominan fiskal”, tingkat harga ditentukan oleh batasan anggaran antar-waktu. Jika surplus masa mendatang tidak cukup untuk menutupi defisit, tingkat harga harus disesuaikan ke level lebih tinggi, yang menurunkan nilai riil utang pemerintah. Kebijakan moneter akan bereaksi terhadap rezim “dominan fiskal”: penawaran uang bereaksi terhadap perubahan tingkat harga untuk membawa persamaan permintaan uang kepada titik keseimbangan (Carlston & Fuerst, 1999).

Selain memiliki pengaruh negatif, inflasi juga dapat berpengaruh terhadap positif pertumbuhan ekonomi. Inflasi ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagi para pelaku bisnis, kenaikan harga pun dapat memberikan keuntungan secara maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Namun, ketika laju kenaikan harga lebih dari tiga puluh persen dan hampir mencapai seratus persen, maka keadaan perekonomian bisnis bisa menjadi semakin kacau.

Tingkat inflasi yang sehat dianggap hal yang positif, karena menghasilkan peningkatan upah dan profitabilitas perusahaan. Sehingga membuat modal mengalir dalam ekonomi yang terus tumbuh. Selama segala sesuatunya bergerak secara relatif positif, maka inflasi tidak merugikan.

2.2.2 Keterkaitan Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit Anggaran

Tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) atau BI-rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia (BI) merupakan suku bunga kebijakan moneter (*policy rate*). Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) akan mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito yang berakibat pada perubahan suku bunga kredit. Dengan demikian BI-rate tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat menggerakkan sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara jika BI-rate diturunkan dikhawatirkan akan memicu pelarian dana jangka pendek yang akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan, Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian, Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dengan Suku Bunga berpengaruh signifikan Hal ini sejalan dengan penelitian Siwi Nur Indriyani dengan judul "Analisis Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel suku bunga

(BIRATE) tidak berpengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratnah S. (2015) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Defisit APBN Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap defisit anggaran. Besar kecilnya tingkat suku bunga Bank Indonesia tidak mempengaruhi defisit anggaran dapat disebabkan apabila asumsi pemerintah dalam penetapan anggaran terhadap tingkat suku bunga sudah tepat. Sehingga kenaikan tingkat suku bunga sudah dapat diantisipasi dari awal yang selanjutnya mengakibatkan anggaran yang sudah ditetapkan dengan asumsinya tepat sasaran. Hasil penelitian yang dilakukan Slamet Riyadi (2010) juga menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap defisit anggaran, sehingga apabila suku bunga meningkat maka defisit anggaran akan tetap tidak berubah.

Menurut perspektif teori Neoklasik, defisit anggaran dapat menyebabkan adanya crowding out atau tingkat suku bunga akan naik. Apabila defisit anggaran dibiayai dengan penerbitan obligasi negara maka permintaan untuk kredit mengalami kenaikan. Penerbitan obligasi negara dalam jumlah besar di dalam pasar modal dan pasar uang yang belum berkembang akan memberikan tekanan yang kuat terhadap anggaran dan mendesak keluar (*crowd out*) pasar keuangan (Waluyo, 2006). Namun yang terjadi adalah dalam jangka pendek, meskipun defisit anggaran dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah surat berharga yang diterbitkan, tetapi hal ini tidak berdampak pada suku bunga BI rate. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh nilai outstanding obligasi yang lebih kecil dari kapitalisasi saham. Outstanding surat berharga pemerintah di Indonesia memang naik dari tahun ke tahun tetapi masih kalah jumlah dibandingkan dengan nilai kapitalisasi saham. Hal ini disebabkan pula karena

masyarakat lebih banyak memilih untuk berinvestasi saham jika dibandingkan dengan pembelian surat berharga. Karena nilai outstandingsnya yang sedikit maka dari itu pergerakannya dalam memengaruhi suku bunga BI rate baik secara langsung maupun tidak langsung masih belum bisa terlihat nyata.

2.2.3 Keterkaitan Nilai tukar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Defisit

Anggaran

Kurs memainkan peranan yang sangat penting dalam menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara kedalam suatu bahasa yang sama (Krugman, 2005). Lebih lanjut kurs adalah salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan aktivitas ekspor (Mankiw, 2006).

Nilai tukar yang belfluktuasi tak terkendali akan menyebabkan kesulitan dalam menetapkan kebijakan, terutama bagi pelaku usaha yang akan mendatangkan bahan baku dari luar negeri ataupun bagi pelaku yang menjual barangnya ke pasar ekspor, oleh karena itu kebijakan terhadap nilai mata uang agar tetap dalam posisi stabil menjadi salah satu faktor moneter yang mendukung perekonomian secara makro (Pohan, 2008).

Nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan, serta besarnya pembiayaan anggaran.

Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya.

Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun (terdepresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak dan hal ini akan membebani APBN karena pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari APBN bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri akan melonjak (Kuncoro, 2011).

Dengan demikian, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit APBN negara. Hubungan nilai tukar dengan defisit APBN secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat saat nilai tukar dihubungkan dengan kegiatan ekspor dan impor. Saat nilai rupiah melemah atau terdepresiasi terhadap dollar Amerika (USD), hal ini akan berdampak pada kegiatan ekspor. Terdepresiasinya rupiah terhadap dolar Amerika akan menambah keuntungan bagi eksportir sehingga hal ini akan merangsang eksportir tersebut untuk melakukan kegiatan ekspor lebih banyak lagi karena harga barang ekspor dari Indonesia relatif akan lebih murah di luar negeri, sementara keuntungan yang diperoleh eksportir lebih besar. Dengan demikian, volume ekspor akan meningkat dan hal ini mengakibatkan penerimaan ekspor akan meningkat pula. Selain itu, meningkatnya ekspor juga akan dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Sebaliknya, apabila nilai tukar rupiah menguat (terapresiasi) terhadap dollar Amerika maka eksportir akan memperoleh keuntungan yang relatif lebih kecil.

Nilai tukar merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika (terdepresiasi) mengakibatkan harga barang-barang di luar

negeri relatif lebih mahal dan harga-harga domestik relatif lebih murah, sehingga impor cenderung menurun. Hal ini akan mendorong permintaan (demand) untuk barang-barang domestik meningkat, sehingga produksi dalam negeri meningkat dan akan berdampak pada naiknya output riil yang kemudian akan meningkatkan PDB riil. Peningkatan PDB riil dan kegiatan ekspor selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan negara yang meningkat akan dapat mengurangi defisit APBN Indonesia.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai defisit anggaran telah banyak dilakukan antara lain Joko Waluyo (2006), yang menganalisis tentang dampak pembiayaan defisit anggaran dengan utang luar negeri terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi studi kasus Indonesia tahun 1970-2003, dengan menggunakan model persamaan simultan. Dimana hasil penelitiannya adalah pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan hutang luar negeri akan berdampak.

Ristil, Nicolaescu dan Tagaduan (2013) menggunakan analisis regresi pada data time series untuk real PDB dan anggaran umum konsolidasi menganalisis dampak timbal balik antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi Rumania. Temuan ini menunjukkan korelasi positif antara Tingkat pertumbuhan PDB dan neraca pemerintah secara umum dalam jangka panjang. Ekonomi positif Pertumbuhan menciptakan sumber daya tambahan dan ini menghasilkan hubungan kausalitas antara ekonomi pertumbuhan dan defisit anggaran. Dengan demikian pada periode pertumbuhan ekonomi yang positif, defisit anggaran yang besar harus berkecil hati.

Keho (2010) memperkirakan hubungan antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi untuk barat negara-negara Afrika Ekonomi dan Moneter (WAEMU) dengan mengikuti Toda dan Versi Yamamoto dari Uji Kausalitas Granger. Hasilnya gagal menolak null hipotesis Granger non-kausalitas untuk Pantai Gading, Senegal dan Togo, tidak menunjukkan bukti kausalitas antara defisit dan pertumbuhan dan ini mengkonfirmasi hipotesis Ricardian.

Dalam Kasus Nigeria, ada hubungan kausal searah dari defisit hingga pertumbuhan yang menyiratkan hal itu lama Penyimpangan dalam defisit fiskal menyebabkan deviasi pada tingkat pertumbuhan namun penyimpangan pada pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan deviasi jangka panjang dalam defisit fiskal. Tapi di negara-negara, seperti Mali, Burkina Faso dan Benin, ada kausalitas timbal balik antara pertumbuhan dan defisit. Ini berarti bahwa variasi defisit anggaran menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Variabel defisit anggaran positif, menyimpulkan bahwa defisit menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi.

Evans (1987) meneliti tentang keterkaitan tingkat suku bunga dengan budget defisit di Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan data tahun 1974–1985, hasilnya bahwa budget defisit dapat menaikkan tingkat suku bunga.

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel kurs atau nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Alpon Satrianto (2015) dengan judul “Analisis Determinan Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran. Apabila kurs atau nilai tukar terdepresiasi maka harga jual produk-produk Indonesia di luar negeri menjadi

lebih kompetitif sebab harga produk-produk Indonesia diluar negeri menjadi lebih murah sehingga kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan ekspor. Dilain hal, kurs yang terdepresiasi ini mengakibatkan harga-harga barang luar negeri di dalam negeri (barang impor) menjadi lebih tinggi atau lebih mahal, sehingga permintaan terhadap barang barang impor ini menjadi turun. Peningkatan ekspor dengan impor yang menurun ini akan berdampak terhadap meningkatnya surplus perdagangan. Surplus perdagangan akan mendorong meningkatnya cadangan devisa negara hal ini akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat pada nantinya akan menurunkan defisit anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Manamba Epaphra (2017) di Tazania dengan menggunakan metode VAR-VECM juga menyimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran pada tahun 1996-2015, dimana apabila nilai tukar mengalami peningkatan maka defisit anggaran akan mengalami penurunan.

Ristil, Nicolaescu dan Tagaduan (2013) menggunakan analisis regresi pada data time series untuk real PDB dan anggaran umum konsolidasi menganalisis dampak timbal balik antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi Rumania. Temuan ini menunjukkan korelasi positif antara Tingkat pertumbuhan PDB dan neraca pemerintah secara umum dalam jangka panjang. Ekonomi positif Pertumbuhan menciptakan sumber daya tambahan dan ini menghasilkan hubungan kausalitas antara ekonomi pertumbuhan dan defisit anggaran. Dengan demikian pada periode pertumbuhan ekonomi yang positif, defisit anggaran yang besar harus berkecil hati.

Keho (2010) memperkirakan hubungan antara defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi untuk barat negara-negara Afrika Ekonomi dan Moneter (WAEMU) dengan mengikuti Toda dan Versi Yamamoto dari Uji

Kausalitas Granger. Hasilnya gagal menolak null hipotesis Granger non-kausalitas untuk Pantai Gading, Senegal dan Togo, tidak menunjukkan bukti kausalitas antara defisit dan pertumbuhan dan ini mengkonfirmasi hipotesis Ricardian.

Dalam Kasus Nigeria, ada hubungan kausal searah dari defisit hingga pertumbuhan yang menyiratkan hal itu lama Penyimpangan dalam defisit fiskal menyebabkan deviasi pada tingkat pertumbuhan namun penyimpangan pada pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan deviasi jangka panjang dalam defisit fiskal. Tapi di negara-negara, seperti Mali, Burkina Faso dan Benin, ada kausalitas timbal balik antara pertumbuhan dan defisit. Ini berarti bahwa variasi defisit anggaran menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Variabel defisit anggaran positif, menyimpulkan bahwa defisit menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi.

Evans (1987) meneliti tentang keterkaitan tingkat suku bunga dengan budget defisit di Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan data tahun 1974–1985, hasilnya bahwa budget defisit dapat menaikkan tingkat suku bunga.

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel kurs atau nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Alpon Satrianto (2015) dengan judul “Analisis Determinan Defisit Anggaran dan Utang Luar Negeri Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran. Apabila kurs atau nilai tukar terdepresiasi maka harga jual produk-produk Indonesia di luar negeri menjadi lebih kompetitif sebab harga produk-produk Indonesia diluar negeri menjadi lebih murah sehingga kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan ekspor. Dilain hal, kurs yang terdepresiasi ini mengakibatkan harga-harga barang luar negeri di

dalam negeri (barang impor) menjadi lebih tinggi atau lebih mahal, sehingga permintaan terhadap barang-barang impor ini menjadi turun. Peningkatan ekspor dengan impor yang menurun ini akan berdampak terhadap meningkatnya surplus perdagangan. Surplus perdagangan akan mendorong meningkatnya cadangan devisa negara hal ini akan meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang meningkat pada nantinya akan menurunkan defisit anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Manamba Epaphra (2017) di Tanzania dengan menggunakan metode VAR-VECM juga menyimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran pada tahun 1996-2015, dimana apabila nilai tukar mengalami peningkatan maka defisit anggaran akan mengalami penurunan.

Agustina Suryani (2017) melakukan penelitian Analisis Pengaruh Pinjaman Luar Negeri, Surat Utang Negara, Penerimaan Pajak dan Inflasi Terhadap Defisit Anggaran di Indonesia sebelum dan sesudah tahun 2000 variabel yang digunakan adalah Defisit Anggaran, Pinjaman LN, Surat Utang Negara, Penerimaan Pajak Inflasi dengan Metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian Pada periode 1985-1999 variabel pinjaman luar negeri, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran tetapi variabel penerimaan pajak dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap defisit anggaran. Pada tahun 2000-2015 variabel yang digunakan adalah surat utang negara, pinjaman luar negeri, penerimaan perpajakan dan inflasi yang mempunyai pengaruh terhadap defisit anggaran. Pada variabel surat utang negara berpengaruh negatif dan signifikan terhadap defisit anggaran.

Tohap Parulian (2010) melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Error Correction Model pada

tahun 1969 sampai 2000” variabel yang digunakan adalah Pengeluaran pemerintah saat ini, pertumbuhan ekonomi tahun lalu, arus modal masuk, tingkat inflasi. Dengan menggunakan metode kointegrasi ECM (Error Correction Model) yang menghasilkan kesimpulan bahwa Secara umum hasil estimasi memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, arus modal masuk, inflasi, pengeluaran pemerintah tahunan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Indonesia. Dalam jangka pendek arus modal masuk dan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Nesti (2012) melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia pada tahun 1984-2011”. Variabel yang digunakan adalah Government Spending, Inflasi, Investasi, PDB, Exchange Rate, Tax Revenue, Net Export. Penelitian ini menggunakan Model VAR yang menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel jangka pendek yang signifikan adalah variabel ekspor bersih, dan PDB. Sedangkan variabel yang signifikan dalam jangka panjang adalah variabel nilai tukar, ekspor bersih, inflasi, dan PDB.

Ratnah S (2015) melakukan penelitian dalam jurnal yang berjudul “Faktor faktor yang berpengaruh terhadap Defisit APBN Indonesia”. Variabel yang digunakan adalah Defisit Anggaran, Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar, Harga Minyak Dunia dan Suku Bunga. Penelitian ini menggunakan Model Regresi two Stage Least Square (2SLS). Kesimpulannya adalah Variabel Nilai Tukar, harga minyak dunia, inflasi secara signifikan mempengaruhi terhadap Defisit Anggaran. Variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap Defisit Anggaran

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada teori dan studi empiris yang telah dikemukakan sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara Inflasi, Suku bunga, dan Nilai Tukar melalui Pertumbuhan ekonomi terhadap defisit anggaran.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah model penelitian. Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas kerangka pikir penelitian, pada gambar 3.1 inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis inflasi yang tinggi biasanya diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran, Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Secara tidak langsung, melalui pertumbuhan ekonomi, naiknya harga barang dan jasa akan mengakibatkan turunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini menjadikan permintaan menurun dan produksi menjadi ikut menurun. Output riil menjadi rendah yang akhirnya akan berdampak pada turunnya PDB riil suatu negara dan pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh sehingga menjadi rendah. Selanjutnya, pendapatan negara akan menurun dan membawa konsekuensi naiknya defisit anggaran karena dengan pendapatan yang menurun negara harus tetap menyediakan kebutuhan publik rakyatnya.

Suku bunga merupakan tolak ukur dari kegiatan perekonomian suatu negara yang berimbas pada kegiatan perputaran arus keuangan perbankan,

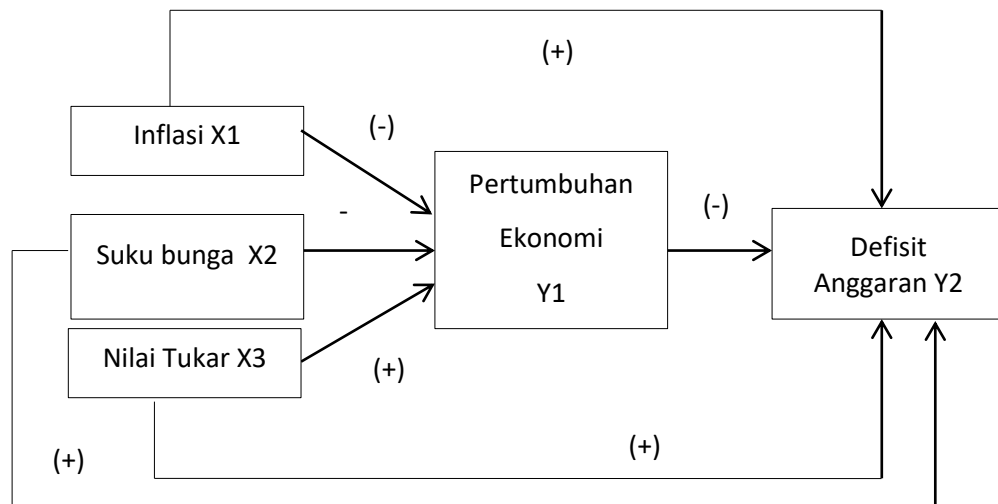
dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila tingkat suku bunga tinggi menyebabkan cost of money menjadi mahal, hal yang demikian akan memperlemah daya saing ekspor dipasar dunia sehingga dapat membuat dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, produksi akan turun dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan (Boediono, 1990). Sedangkan berpengaruh positif terhadap defisit anggaran, Tingkat bunga adalah “harga” dari penggunaan uang atau dapat dipandang sebagai “sewa” atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Hubungan suku bunga dengan defisit anggaran secara langsung, dapat dilihat melalui pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh negara sesuai masa berlakunya. Apabila suku bunga naik, maka beban pembayaran bunga dan pokoknya terhadap SBN yang diterbitkan akan meningkat. Hal ini secara langsung akan menambah beban anggaran sehingga dapat membuat defisit anggaran meningkat.

Nilai tukar berpengaruh positif terhadap defisit anggaran, harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, dengan kata lain kurs valuta asing adalah harga dari satu unit mata uang asing atau perbandingan harga antara valuta bila terjadi pertukaran. sebagai salah satu negara yang melakukan pinjaman luar negeri, mengalami masalah apabila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Masalah ini disebabkan karena nilai pinjaman dihitung dengan valuta asing, sedangkan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman dihitung dengan rupiah. Apabila nilai tukar rupiah menurun (terdepresiasi) terhadap mata uang dollar AS, maka yang akan dibayarkan juga membengkak dan hal ini akan membebani anggaran karena pembayaran

cicilan pokok dan bunga pinjaman yang diambil dari anggaran bertambah, lebih dari apa yang dianggarkan semula atau dengan kata lain pembayaran utang luar negeri akan melonjak. Dengan demikian, melonjaknya pembayaran utang luar negeri akan meningkatkan defisit anggaran negara.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, dengan peningkatan penerimaan perpajakan, diharapkan akan mengakibatkan anggaran Indonesia menjadi surplus atau dengan kata lain, apabila anggaran mengalami defisit pada tahun sebelumnya, maka dengan peningkatan penerimaan perpajakan akan mengakibatkan defisit anggaran dapat menurun pada periode tahun berikutnya, bahkan diharapkan dapat mengakibatkan anggaran surplus.

Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Bangun Kerangka Konseptual penelitian

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan. Dari permasalahan di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh Negatif terhadap defisit anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 2002-2020
2. Suku bunga berpengaruh positif terhadap defisit anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 2002-2020
3. Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap defisit anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi 2002-2020
4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap defisit anggaran 2002-2020